

Respon Umat Beragama atas Rencana Vaksinasi Covid-19

Survei "Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Umat Beragama terkait Covid-19, Vaksin, dan Vaksinasi" (Desember 2020)

Tim Peneliti Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

Rilis 8 Januari 2021

Abstraksi

Rencana vaksinasi Covid-19 mendapat beragam respon. Banyak yang siap, tidak sedikit yang menolak atau ragu-ragu. Sejumlah kajian menunjukkan, diantara alasan penolakan atau keraguan adalah alasan keyakinan agama. Benarkah agama menolak vaksin dan rencana vaksinasi? Lalu, bagaimana gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan umat beragama terkait Covid-19, vaksin dan vaksinasi?

Survei-daring pada 22-30 Desember 2020 ini berhasil mengumpulkan 2.610 pendapat responden dari 34 provinsi. Dengan *accidental sampling* yang non-probabilitas, survei ini tetap dapat memenuhi tingkat sebaran yang sebangun dengan komposisi jumlah penduduk dan pemeluk agama di Indonesia. Lebih jauh, ada penguatan informasi kualitatif dengan mewawancarai 30 tokoh/pemuka agama di 10 lokasi.

Ditemukan, responden umumnya (54,37%) siap divaksin Covid-19, di tengah pandemi yang kian mengkhawatirkan ini. Namun ada juga yang menolak (9,39%) dan memilih belum memutuskan (36,25%). Alasan mereka cukup beragam. Yang menolak, utamanya ragu atas keamanan vaksin. Yang beralasan agama hanya 9,27%.

Responden yang belum memutuskan, *wait and see*, sambil mencari tahu detail vaksin dan rencana vaksinasi tersebut. Sumber utama informasi mereka: media elektronik (80,96%) dan media sosial (72,76%).

Survei ini merekomendasikan penguatan edukasi publik terkait vaksin dan vaksinasi. Selain penjelasan medis yang transparan oleh dokter, edukasi dalam hal keagamaan perlu diintensifkan terutama oleh pemuka agama. Peran pemuka agama dan ormas keagamaan sangat strategis karena mereka sumber informasi paling dipercaya publik.

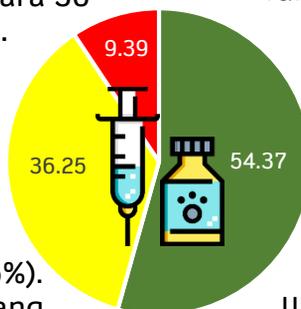
Untuk meningkatkan penerimaan masyarakat akan vaksinasi Covid-19, beberapa hal layak dipertimbangkan, yaitu:

Pertama, perkembangan aktual dan faktual pandemi Covid-19 perlu diinformasikan ke publik secara proporsional. Data mengindikasikan, semakin responden tahu kondisi dan merasa khawatir dengan kondisi pandemi, maka semakin menerima rencana vaksinasi Covid-19.

Kedua, Pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik. Data memperlihatkan, kepercayaan pada Pemerintah sebangun dengan kesiapan untuk ikut vaksinasi.

Ketiga, masyarakat perlu didorong untuk terus menaati protokol kesehatan (3M). Responden yang merasa menaati 3M cenderung siap ikut vaksinasi.

Terakhir, perlu transparansi, sosialisasi, dan penjelasan yang lebih lengkap terkait rencana vaksinasi Covid-19 tersebut. Hal ini pangkal dari ketidaksiapan dan keraguan responden. Kejelasan memicu kesiapan.[]



Pendahuluan

Di temukannya vaksin Covid-19 menjadi babak baru penanganan pandemi. Ada harapan yang besar pandemi segera usai, dengan terbentuknya kekebalan masyarakat. Juga, ada kerinduan akan normalnya kembali berbagai segi kehidupan.

Vaksin Covid-19 kini telah tiba di Indonesia. [Pengujian](#) keamanan dan efektivitasnya telah dan sedang dilakukan. [Presiden](#) juga telah menegaskan rencana vaksinasi bagi sebagian besar masyarakat, dengan gratis. Bahkan, untuk membangun kepercayaan publik, dirinya telah menegaskan kesiapannya sebagai orang yang [pertama divaksin](#).

Sayangnya, [tidak semua](#) masyarakat yakin dan menerima vaksin Covid-19 dan rencana vaksinasi tersebut. [Survei nasional](#) oleh Kemenkes, ITAGI, UNICEF dan WHO pada September 2020, misalnya, menemukan ada 7,6% masyarakat yang menolak dan 27% yang ragu akan vaksinasi (diagram 1). Bahkan, dalam survei-antar-waktu oleh [SMRC](#) tampak adanya kecenderungan penurunan kesediaan masyarakat secara nasional untuk divaksin (diagram 2).

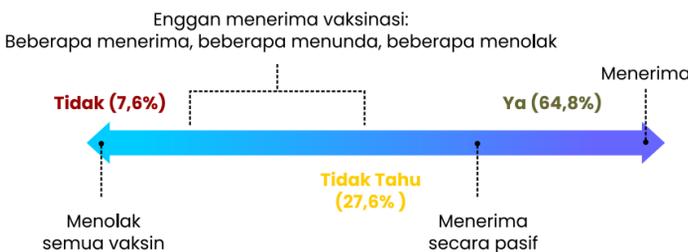


Diagram 1. Status Penerimaan vaksin Covid-19 (Kemenkes, 2020)

Dalam satu bulan terakhir, terjadi perubahan sikap responden, dari semula siap divaksinasi menjadi “pikir-pikir dulu” atau bahkan menjadi tidak akan divaksin.

Fenomena dan kecenderungan ini penting untuk ditelisik lebih jauh, dan dipahami dari berbagai perspektif.

Jika vaksin sudah tersedia, apakah Ibu/Bapak akan melakukan vaksinasi Covid-19? ... (%)

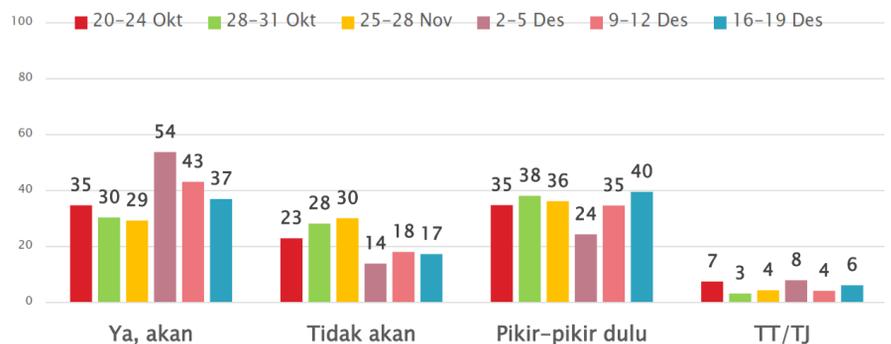


Diagram 2. Kesediaan melakukan vaksinasi Covid-19 (SMRC, 2020)



Diagram 3. Alasan umum penolakan vaksin Covid-19 (Kemenkes, 2020)

Survei Kemenkes, dkk menyebut “keyakinan agama” sebagai salahsatu diantara alasan penolakan vaksin (diagram 3). Disebutkan, sebagian masyarakat memiliki persepsi bahwa spiritualitas adalah cara terbaik dalam menghadapi penyakit. Sebagian lain mungkin menyoal perihal kehalalan vaksin. Sayangnya, belum ada penjelasan lain yang lebih memadai soal ini.

Persis pada titik itulah riset ini diperlukan dan menemukan distingsinya. Bagaimana gambaran kecenderungan umat beragama menyikapi Covid-19, vaksin, dan rencana vaksinasi Covid-19? Elaborasi dari sisi umat beragama dan dari perspektif keagamaan, diperlukan untuk melengkapi dan memperkaya temuan di atas, dan kajian serupa.

Temuan ini juga dapat menjadi asupan spesifik dalam rekomendasi bahan pengambilan kebijakan Pemerintah terkait rencana vaksinasi Covid-19.

Di sisi lain, riset ini juga hendak menegaskan bahwa berbagai upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 adalah tugas bersama—termasuk Kementerian Agama.

Metodologi dan Profil Responden

Untuk mendapat gambaran kecenderungan sikap umat, dilakukan survei-daring dengan cara menyebarkan *link* angket ke siapa saja di 34 provinsi, pada 22-30 Desember 2020. Karena menggunakan *accidental sampling* yang non-probabilitas (tanpa acak), maka temuan survei ini hanya berlaku bagi responden, serta tidak dapat menggeneralisir seluruh umat.

Meski demikian, komposisi 2.610 responden survei ini tersebar secara nasional serta sebangun dengan komposisi penduduk Indonesia (diagram 4). Demikian halnya dalam hal pemeluk agama (diagram 5).

Lebih dari itu, untuk mendapat penjelasan lebih memadai, pada 21-23 Desember 2020 dilakukan wawancara langsung kepada 30 pemuka agama di 10 lokasi. Kedua temuan diolah secara komplementatif dan terpadu.

Responden yang kebanyakan (59%) laki-laki ini pada umumnya dari usia produktif, yakni 26-39 tahun (41%) dan 40-55 tahun (37%), dan tinggal di perkotaan (58%). Responden umumnya telah menamatkan studi; S1 (53%), S2 (22%) dan SMA (15%).

Pekerjaan responden cukup variatif. Yang terbanyak ASN (38%), lalu pegawai swasta (16%), mahasiswa/pelajar (10%). Hanya 5% yang menyatakan tidak bekerja. Adapun pengeluaran pribadi responden umumnya berada di atas Rp3.750.000 per bulan (36%), lalu Rp3.750.000-1.900.001 (25%). Yang di bawah Rp375.000 hanya 6%.

Agama responden beragam dan sebangun komposisinya dengan pemeluk agama di Indonesia sebagaimana hasil Sensus 2010 (diagram 5). Responden Islam 86,59%, Kristen 5,98%, Katolik 2,22%, Hindu 2,34%, Buddha 0,84%, Khonghucu 1,49%, dan lainnya 0,23%.

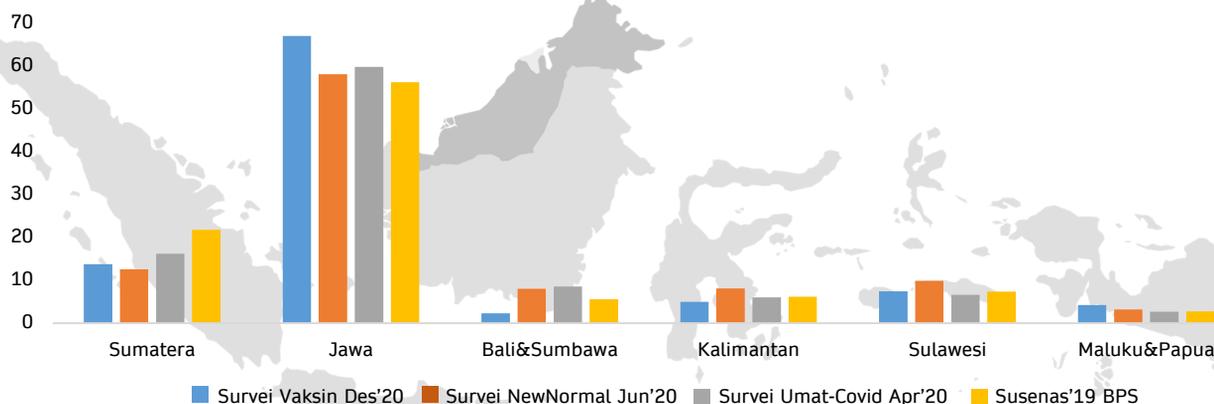
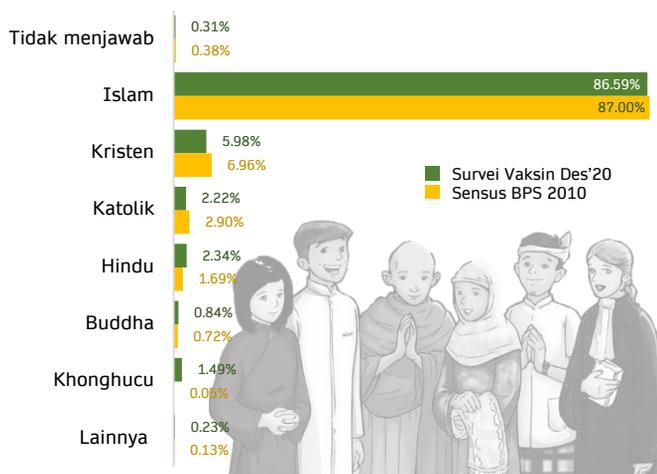


Diagram 4. Perbandingan komposisi jumlah responden pada empat survei



Responden umumnya (67%) bukan anggota (atau tidak merasa dekat dengan) ormas/ lembaga keagamaan, dan 29% lainnya dari beragam ormas di lingkungan agamanya, seperti: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, Nahdlatul Wathan, Persis, LDII, GBKP, GMIM, PHDI, Magabudhi, Makin, dll.

Sebagian responden (22%) merupakan pemuka agama, sementara lainnya (78%) mengaku sebagai umat saja. Adapun 30 informan wawancara, seluruhnya pemuka agama dari 6 agama yang banyak dipeluk masyarakat Indonesia.

Diagram 5. Perbandingan komposisi pemeluk agama (Survei Vaksin Des'20 - BPS'10)

Umat Menjalani Pandemi

Responden (baca: umat beragama) umumnya mengetahui zonasi pandemi Covid-19. Banyak responden mengaku berada di zona merah (46,93%) dan bahkan hitam (2,61%). Hanya 8,74% yang berada di zona hijau.



Diagram 6. Zona pandemi responden

Mayoritas responden (87,93%) juga setuju bahwa kondisi pandemi saat ini kian mengkhawatirkan. Maka hampir seluruh responden (98,31%) merasa selalu mematuhi protokol kesehatan.

Namun demikian, banyak juga dari mereka (78,12%) melihat adanya pelanggaran umat pada protokol kesehatan. Meski begitu, jika dibandingkan, ketaatan atas protokol kesehatan di rumah ibadat ternyata masih lebih tinggi (81,76%) dibandingkan dengan ketaatan atas protokol kesehatan di mall atau pasar (59,96%).



Gambar 1. Penerapan protokol kesehatan di rumah ibadat dan mall/pasar

Terkait kondisi pandemi, Pdt. DB, pemuka agama Kristen di Bekasi, menyatakan,

“Sangat mengkhawatirkan. Mungkin sekarang agak berbeda gejalanya seperti waktu pertama-tama. Jumlah pasien yang tertular, makin banyak. Karena banyaknya masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan tersebut.”

Hal ini diamini Made, pemuka agama Hindu di Tangerang, yang mengatakan,

“Mengkhawatirkan! Beberapa jemaat kami ada yang kena. Tidak tahu karena perjalanan atau di tempat pekerjaan, atau di mana....”

Menarik membandingkan pengalaman responden dalam menaati protokol kesehatan pada tiga fase pandemi; fase awal pandemi (**April**), awal penerapan *new normal* (**Juni**), dan saat vaksin telah ditemukan sekarang ini (Desember 2020). Tampak ada kecenderungan perubahan tindakan mereka.

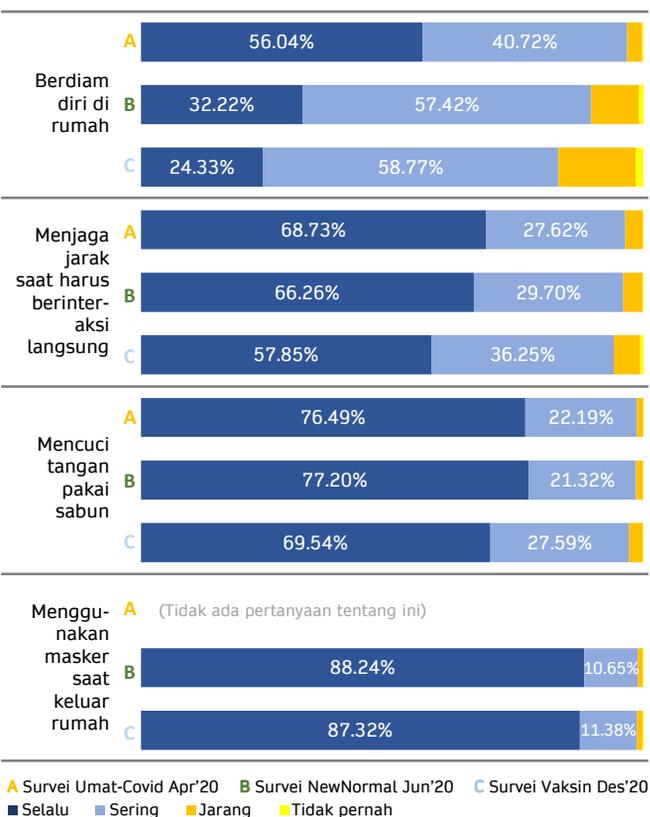


Diagram 7. Perbandingan ketaatan pada protokol kesehatan

Mereka tampak sudah tidak betah berdiam di rumah (dari 56% yang selalu di rumah, menjadi 32% lalu 24%). Demikian halnya, dalam kepatuhan terhadap protokol kesehatan (**3M**). Meski umumnya masih baik, namun ada kecenderungan semakin tidak ketat dalam menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan dalam menggunakan masker saat keluar rumah (diagram 7).

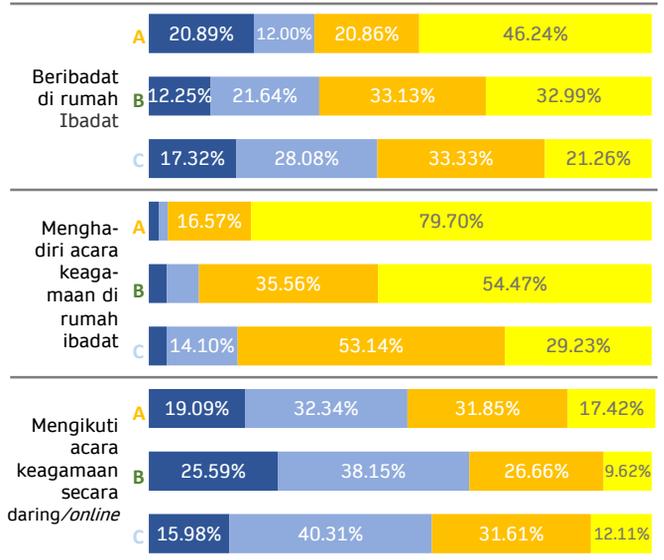
Temuan-antar-waktu ini (meski berbeda responden dan jumlahnya) mengonfirmasi adanya gejala pelanggaran dalam menerapkan protokol kesehatan tersebut di atas. Fakta ini juga menegaskan perlunya untuk kembali memperkuat edukasi masyarakat soal protokol kesehatan (**3M**)—terlebih saat kondisi pandemi kian mengkhawatirkan.

Menarik juga melihat perbandingan pengalaman responden dalam menjalani sejumlah kebiasaan baru (*new normal*) beragama (diagram 8). Meski umumnya memenuhi anjuran untuk sementara waktu beribadat di rumah, sejumlah responden mulai sering ke rumah ibadat—meski dengan menerapkan protokol kesehatan. Demikian halnya dalam menghadiri acara-acara keagamaan.

Yang unik, keikutsertaan pada acara-acara keagamaan secara daring (*online*) nampaknya mulai menemui titik jenuh; terjadi tren penurunan kembali. Meski begitu, ada juga kreativitas umat dalam rangka menjawab kondisi darurat ini. Sebagaimana diceritakan MS, pengurus Muhammadiyah Yoga,

“Ini kejadian luar biasa, yang menurut saya masih akan belum bisa pulih seperti sediakala dalam waktu satu tahun ke depan. Kalau Muhammadiyah melihat, saat ini masih dalam kondisi darurat, maka ada beberapa ustadz yang solat jumat secara daring, Jumatan online, Ustadz Wawan Gunawan. Jamaahnya ratusan.”

Peran ormas dan pemuka agama memang sangat penting dalam menjalani masa *new normal* beragama. Pada kondisi luar biasa, apalagi fluktuasi pandemi yang kini kian mengkhawatirkan (diagram 9), umat butuh panduan solutif dari otoritas keagamaan.



Legend: A Survei Umat-Covid Apr'20, B Survei NewNormal Jun'20, C Survei Vaksin Des'20. Colors: Selalu (Dark Blue), Sering (Medium Blue), Jarang (Light Blue), Tidak pernah (Yellow).

Diagram 8. Perbandingan pengalaman intensitas aktivitas keagamaan

Sebagai contoh, MUI DKI telah menerbitkan 6 fatwa di masa pandemi, antara lain: 1. Hukum/Pedoman Penanganan Jenazah Covid-19; 2. Hukum Mengunjungi Keramaian di Jakarta di Situasi Pandemi; 3. Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan Disinfektan, dll; 4. Panduan Shalat Jumat pada Masa Pandemi; 5. Hukum Kurban Menggunakan Uang di Masa Pandemi; dan 6. Panduan Shalat Berjamaah, Majelis Taklim dan Madrasah di Masa Pandemi. Banyak contoh serupa dari lembaga lainnya.

Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per-Hari NASIONAL

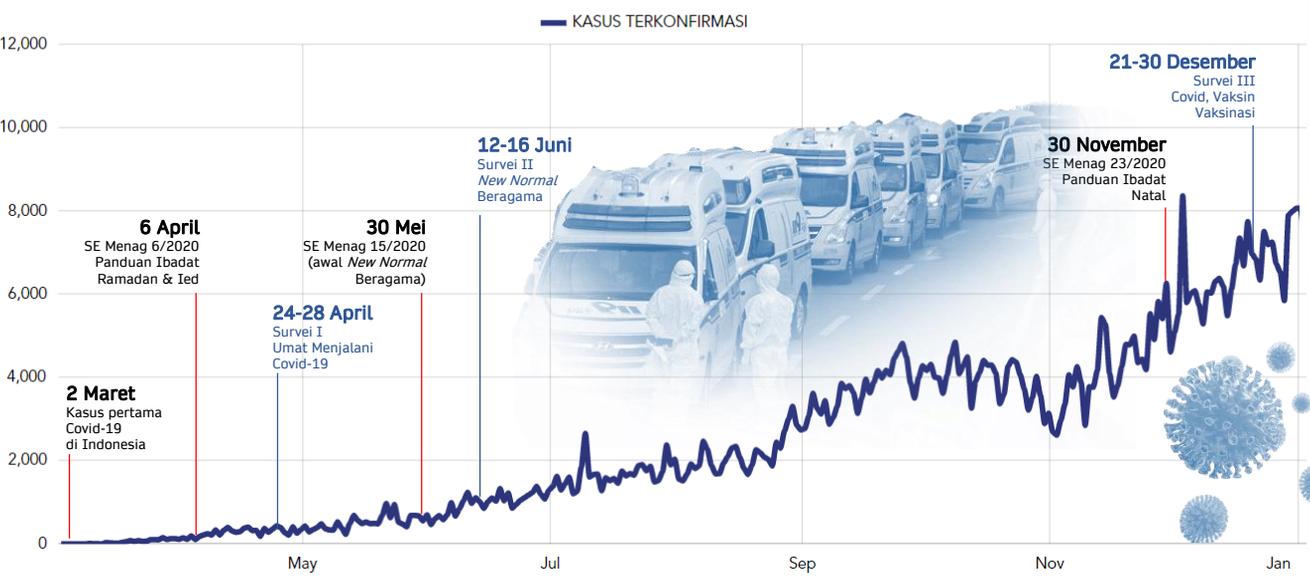


Diagram 9. Data Resmi Nasional, Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per-Hari (covid19.go.id)

Vaksinasi Covid-19: Harapan Baru?

Lalu, berangkat dari kondisi pandemi yang kian mengkhawatirkan tersebut di atas, apakah ditemukannya vaksin Covid-19 telah memberi harapan baru bagi masyarakat? Apakah responden siap divaksinasi? Survei ini menunjukkan, sebanyak 54,37% responden menyatakan kesiapannya untuk ikut vaksinasi Covid-19 (diagram 10).

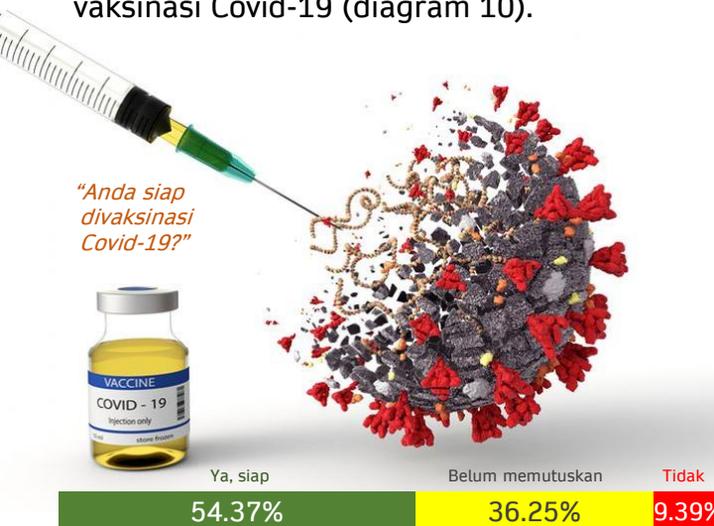


Diagram 10. Kesiapan responden untuk ikut vaksinasi Covid-19

Meski yang menyatakan siap lebih banyak, namun yang masih “belum memutuskan” dan “tidak siap” juga cukup banyak (36,25% dan 9,39%). Temuan ini tidak mengherankan, dan memang senada dengan hasil survei nasional Kemenkes (Sep. 2020) dan SMRC (Des. 2020). Maka, yang penting kemudian adalah perlunya mengelaborasi beragam alasannya.

Responden yang menjawab “tidak” (9,39%) ditanya, “apa alasan tidak akan divaksin?”

1. Tidak yakin dengan keamanan vaksin 66.13%
2. Meragukan kehalatan (kebaikan zat) vaksin 48.39%
3. Khawatir efek samping yang ditimbulkannya 47.98%
4. Tidak yakin dengan efektivitas vaksinasi 46.37%
5. Alasan lainnya 14.52%
6. Proses vaksinasi bertentangan dengan agama/keyakinan 9.27%

Diagram 11. Ragam alasan responden tidak mau divaksinasi Covid-19

Banyak responden yang menolak divaksin (66,13%) karena tidak yakin atas keamanan vaksin. Ada juga yang menyoal kehalalan dan efektivitasnya, dan takut efek sampingnya. Adapun yang menyatakan vaksinasi bertentangan dengan ajaran agama/keyakinannya sangatlah sedikit (9,27%).

Temuan ini menegaskan bahwa fenomena penolakan atas vaksinasi bukanlah karena keyakinan agama, tapi lebih karena hal non-agama. Ihwal kehalalan memang ada yang menyoal, tapi bukan alasan utama. Temuan ini menguatkan hasil Survei Nasional Kemenkes, dkk. (2020), yang menunjukkan unsur agama sebagai alasan terkecil dalam persentasenya (diagram 3).

Berkesesuaian dengan temuan ini, sejumlah pemuka agama yang diwawancarai menjelaskan lebih jauh. Dikatakan AM, salah seorang pengurus DDII di Jakarta,

“Dari kabar yang tersiar memang demikian, bahwa vaksin telah ditemukan. Namun ternyata masyarakat masih belum merasa yakin karena adanya berita yang simpang siur, baik terkait substansi materi vaksin maupun dampak yang ditimbulkan pasca penggunaan vaksin.”



Gambar 2. Contoh berita *hoax* tentang vaksin Covid-19 (kominfo.go.id)

Adapun ihwal kehalalan atau nilai kebaikan zat vaksin, pemuka agama umumnya dapat menoleransi karena alasan kedaruratan (catatan: hingga riset dilakukan, belum ada hasil uji kehalalan vaksin). Dikatakan SM, pengurus PWNU DKI,

“Pertimbangan hukum utama dalam tradisi NU adalah ‘adh-dharurat tubiih al-mahzhurat’, di mana aspek darurat menjadikan sesuatu yang dilarang menjadi boleh. Begitu juga dalam soal vaksin. Ini pernah juga pernah terjadi dalam hal Vaksin Meningitis bagi jamaah haji dan umrah beberapa tahun lalu, prinsipnya sama.”

Ditambahkan AS, pengurus MUI Bogor,

“Terdapat satu kaidah fiqhiyah yang sangat terkenal, dar-ul mafaasid muqoddamun alaa jalbil masholih, mencegah kerusakan itu lebih baik dibanding mengambil manfaat. Ini bermakna, vaksin termasuk golongan obat, upaya manusia untuk mencegah kerusakan tubuh dari gangguan kesehatan semisal virus.”

Di kalangan Kristiani, perihal ini tidak ada masalah. Dikatakan GSN, Kevikepan DIY,

“Sampai hari ini pandangan yang formal gereja Katolik tidak pernah diungkapkan. Tetapi secara umum ya kami melihat itu positif. Sebagaimana anak-anak yang baru lahir juga perlu beberapa vaksinasi, lha kenapa ini masih ditakuti.”

Pemuka Hindu pun memberikan perspektif. Menurut MS, pengurus Pura di Depok,

“Vaksin dalam Hindu disebut ‘usada’, usaha-usaha manusia untuk menyembuhkan penyakit atau wabah. Dalam Wedha terdapat petunjuk bahwa setiap penyakit ada penangkalnya. Adanya vaksin ini bertujuan baik, guna menanggulangi wabah Covid-19 seperti sekarang ini.”

Ihwal kehalalan/kebaikan vaksin juga diungkapkan Kr, pemuka Khonghucu DKI,

“Tentunya dalam tradisi Khonghucu memiliki istilah ‘halal’ yang berbeda. Namun secara substantif, vaksin yang diproduksi haruslah memenuhi unsur higienis yang valid, tidak diproduksi dengan asal-asalan tanpa mengikuti kaidah-kaidah prinsip keagamaan soal kebaikannya menurut ajaran universal dari tiap agama.”

Pendapat para pemuka agama tersebut juga mengonfirmasi tingginya penerimaan masyarakat (baca: umat beragama) atas vaksin Covid-19, sebagaimana hasil survei Kemenkes, dkk. (diagram 12).

Kesediaan menerima vaksin COVID-19 menurut agama dan keyakinan (n=112.888)

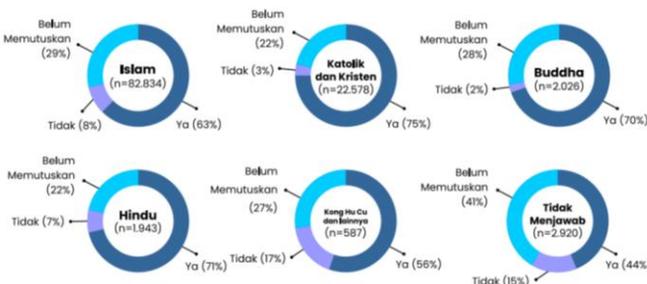


Diagram 12. Tingkat penerimaan vaksin Covid-19 berdasar agama (Kemenkes 2020)

Sementara itu, responden yang menjawab “belum memutuskan” kesiapannya untuk divaksin Covid-19 (36,25%), antara lain memiliki alasan sebagai berikut:

1. Masih ingin mendapat penjelasan lebih lengkap 81.31%
2. Masih ragu karena banyak info mengkhawatirkan ttg vaksin 56.39%
3. Pelaksanaannya masih lama, melihat perkembangan dulu 26.93%
4. Alasan lainnya 6.23%

Diagram 13. Ragam alasan responden belum memutuskan ikut vaksinasi Covid-19

Banyak responden (81,31%) belum mengetahui secara lebih lengkap mengenai vaksin Covid-19, termasuk rencana vaksinasinya. Informasi yang diterima masih sepotong-sepotong, selain memang informasinya pun terus berkembang.

Cukup banyak juga (56,39%) yang dibuat ragu karena banyaknya berita atau hoax yang menakutkan terkait dampak vaksin Covid-19. Misalnya, vaksinasi Covid-19 akan menyebabkan [Bells Palsy](#), [leukemia](#), atau efek buruk lainnya. Ada juga responden yang bersikap *wait and see*, sambil meng-update perkembangan dari waktu ke waktu.

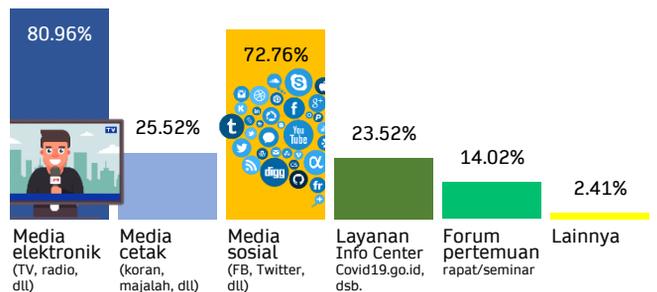
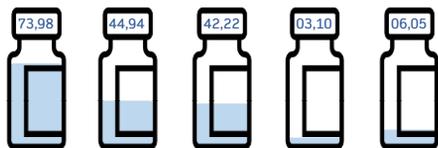


Diagram 14. Sumber informasi terkait vaksin dan vaksinasi Covid-19

Secara umum, responden mendapat informasi terkait Covid-19, vaksin dan vaksinasi dari media elektronik (80,96%) dan media sosial (72,76%). Temuan ini berhubungan dan selaras dengan hasil Survei Nasional [Literasi Digital Indonesia](#) (Kominfo, 2020). Survei tersebut menyebut sumber informasi paling dipercaya, secara berurut: Televisi (49,5%), media sosial (20,3%), situs web Pemerintah (15,3%), berita online (7%), media cetak (4%), dan seterusnya.



Suatu antigen yang disuntikkan ke dalam tubuh untuk mendapat reaksi kekebalan tubuh terhadap Covid-19
 Vaksin melalui 3 tahap uji klinis, uji keamanan, uji efisiensi dan persetujuan dari BPOM
 Terdapat bbrp jenis vaksin Covid-19 dengan beragam tingkat efektivitasnya.
 Lainnya (spt: ...)
 Tidak tahu

Diagram 15. Pengetahuan responden tentang vaksin Covid-19

Pengetahuan responden tentang vaksin dan vaksinasi masih terbatas. Umumnya (73,98%) baru mengetahui bahwa vaksin Covid-19 adalah suatu antigen yang disuntikkan ke dalam tubuh untuk reaksi kekebalan tubuh. Namun, pengetahuan mengenai uji klinis, uji efisiensi, dan uji keamanannya masih rendah (44,94%).



Diagram 16. Pengetahuan tentang rencana vaksinasi Covid-19

Demikian juga, umumnya responden baru tahu rencana vaksinasi itu akan dilakukan ke masyarakat secara bertahap (74,52%) dan gratis (63,75%). Namun, pengetahuan tentang kemungkinan ada efek samping, seperti: demam, meriang, dan pusing setelahnya, juga masih sedikit (26,02%).

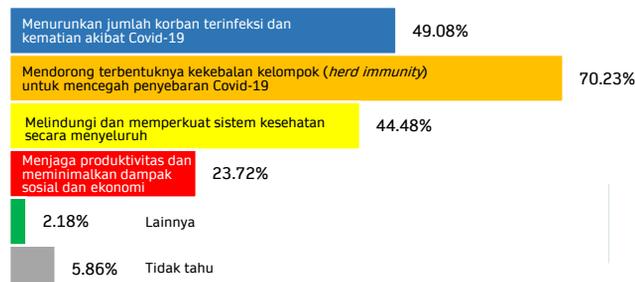


Diagram 17. Pengetahuan tentang manfaat vaksinasi Covid-19

Terkait manfaat vaksinasi Covid, umumnya mengetahui akan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok (70,23%). Tapi, masih sedikit yang menyadari kaitan dan manfaatnya untuk meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi dari pandemi (23,72%).

Masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait vaksin dan vaksinasi ini mendorong perlunya penguatan edukasi masyarakat. Termasuk dalam hal ini, memberi masukan bagi mereka yang “belum menentukan” sikap terhadap rencana vaksinasi Covid-19.

Dalam hal informasi vaksin Covid-19 dan vaksinasi, responden umumnya (84,18%) lebih mempercayai pendapat tenaga kesehatan, seperti dokter. Mereka mempunyai kompetensi dan kapasitas keilmuan untuk itu. Selain itu, pejabat Pemerintah (58,51%) dan tokoh agama (37,16%), tentu dalam hal kebijakan dan sisi-sisi keagamaannya.

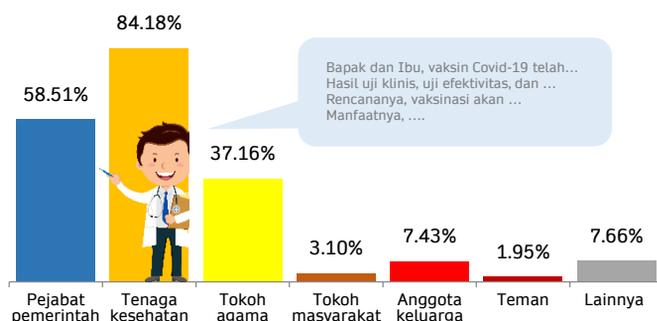


Diagram 18. Pihak yang dipercaya memberikan pendapat

Khusus terkait tokoh agama, peranannya memang sangat strategis dalam diseminasi pengetahuan tentang Covid-19, vaksin, dan vaksinasi ini, kepada masyarakat atau umat beragama. [Survei SMRC Des'20](#) menyebut tokoh agama sebagai yang paling dipercaya menjelaskan pencegahan Covid-19, setelah dokter dan presiden. Juga, [Survei Nasional Literasi Digital Indonesia](#) (Kominfo 2020) menunjukkan bahwa tokoh agama menjadi sumber informasi yang paling dipercaya (diagram 19).

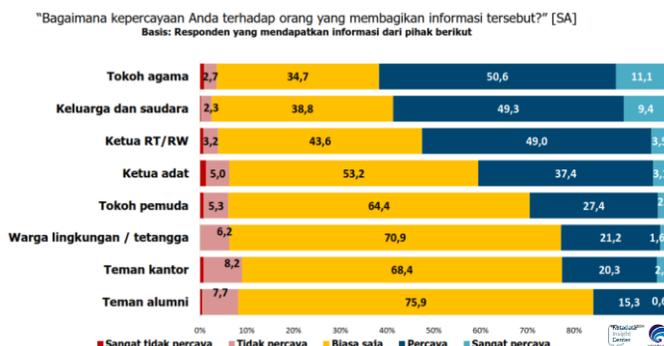


Diagram 19. Sumber informasi yang dipercaya (Survei Kominfo, 2020)

Tokoh Agama untuk Edukasi Publik

Penguatan edukasi publik terkait penanganan Covid-19 perlu banyak memerankan tokoh agama. Secara sosiologis, mereka menjadi panutan atau rujukan kebenaran bagi masyarakat, termasuk dalam hal pro-kontra penggunaan vaksin Covid-19 ini.

Mengenai peran tokoh atau pemuka agama dalam penanganan pandemi Covid-19, sejumlah narasumber memberikan pendapatnya. Misalnya, Pdt. JAS, pemuka agama di Kota Tangerang menyatakan,

“Pemuka agama menurut saya sudah sangat aktif ikut berperan serta dalam melakukan himbuan kepada para jemaatnya untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dalam menghadapi Covid-19.”

SM, Ketua PWNU DKI, mengatakan peran penting para tokoh dan ormas keagamaan yang punya kaki hingga *grassroots*,

“PWNU sudah memutuskan fatwa mengikuti protokol kesehatan, yang salah satu itemnya bisa jadi kewajiban mengikuti vaksinasi bagi jamaah NU. Bisa jadi dibuat Surat Edaran sendiri dan organ PWNU DKI sampai Ranting (Kelurahan) untuk bisa memainkan peran untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.”

Sementara itu, BR, jiao sheng Khonghucu Banyumas, menceritakan bagaimana pelibatan tokoh agama dilakukan,

“Sejak mulai pemberlakuan PSBB lalu, pemda Banyumas mengundang beberapa tokoh agama untuk berdialog. Masing-masing agama ditanya bagaimana pendapatnya, dan ditegaskan untuk ikut menyosialisasikan 3M kepada umatnya.”



Gambar 3. Kolase berita media terkait pelibatan tokoh agama dalam penanganan Covid-19 dan sosialisasi vaksin

Senada dengan itu, Pdt. Dj, Ketua Forum Komunikasi Kristen se-Kota Bekasi berkata,

“[Peran pemuka agama] sangat besar, karena kepercayaan masyarakat terhadap pendeta, didengar. Tapi kalau Pemerintah, belum tentu. Umat saya, kalau saya ngomong A, maka semua A. Libatkan tokoh agama dalam mengedukasi umat, pasti akan didengar.”

Peran tokoh agama juga ditegaskan ATS, mubaligh PP Muhammadiyah di Jakarta. Dikatakannya,

“Tokoh dan pemuka agama dapat menjadi mitra potensial bagi Pemerintah untuk mengatasi dan memutus penyebaran virus ini. Melalui majelis dan forum keagamaan yang dikelola oleh para tokoh agama menjadi faktor penunjang keberhasilan dalam menangani pandemi.”

Pemuka agama Buddha, Sai, menceritakan peran tokoh agama yang telah berjalan di berbagai lini,

“[Pemuka agama Buddha] telah melaksanakan perannya masing-masing, baik di lembaga-lembaga keagamaan, di organisasi keagamaan, maupun di tempat ibadat.”

Adapun IMP, pemuka agama Hindu dan pengurus Pura di Tangerang menceritakan bagaimana tokoh agama dan pengelola rumah ibadat ikut berperan,

“Yang bisa kami lakukan sejauh ini himbuan untuk meningkatkan ketaatan atas protokol 3M. Terkait vaksin, kami baru menyampaikan himbuan dan informasi Pemerintah saja. Video-video Bapak Presiden yang memberikan info biasanya kami forward ke teman maupun WAG.”

Rekomendasi Riset

Dari hasil analisis-silang, beberapa temuan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap rencana vaksinasi Covid-19.

Pertama, perkembangan aktual dan faktual pandemi Covid-19 perlu diinformasikan ke publik secara proporsional. Data mengindikasikan, semakin responden tahu kondisi dan merasa khawatir dengan kondisi pandemi, maka semakin menerima rencana vaksinasi Covid-19 (diagram 20).

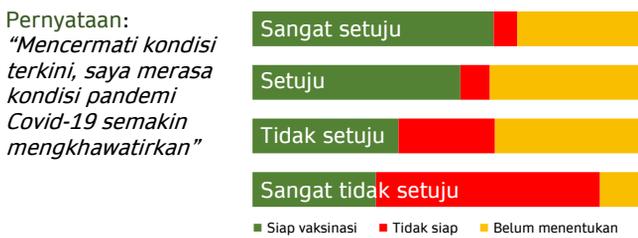


Diagram 20. Rasa khawatir X kesiapan mengikuti vaksinasi

Kedua, (pejabat) Pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik. Hal inilah yang dapat meningkatkan penerimaan atas rencana vaksinasi. Data menunjukkan, meski yang paling dipercaya saat ada pro-kontra vaksin adalah tenaga kesehatan (diagram 18), namun yang paling siap divaksinasi adalah yang percaya kepada pejabat Pemerintah.

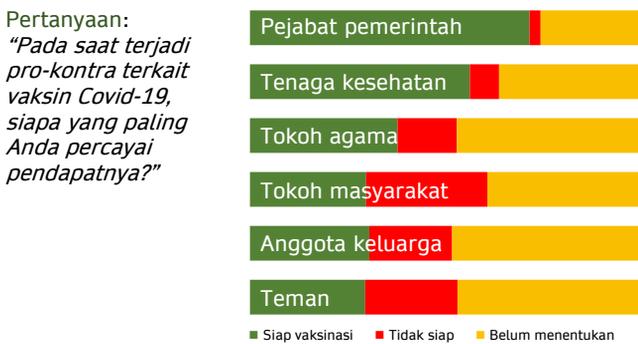


Diagram 21. Figur paling dipercaya X kesiapan mengikuti vaksinasi

Ketiga, masyarakat perlu didorong untuk menaati protokol kesehatan (3M). Sosialisasi dan edukasi perlu ditingkatkan. Data menunjukkan, semakin responden merasa telah mematuhi protokol kesehatan, maka semakin mereka siap atau percaya diri untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.



Diagram 22. Kepatuhan atas protokol kesehatan X kesiapan mengikuti vaksinasi

Keempat, perlu transparansi, sosialisasi, dan penjelasan yang lebih memadai terkait rencana vaksinasi Covid-19 tersebut. Data menunjukkan, ada perbedaan cukup signifikan atas kesiapan dan ketidaksiapan untuk divaksin pada saat responden merasa mendapat kejelasan terkait rencana tersebut.



Diagram 23. Perlunya transparansi dan sosialisasi X kesiapan mengikuti vaksinasi

Tampaknya inilah pangkal keraguan atau ketidaksiapan sebagian responden untuk diberikan vaksin Covid-19—bukannya faktor keyakinan agama, misalnya. Umat terbiasa dengan program imunisasi. Tapi banyak hal yang kini belum jelas bagi publik di seputar vaksin Covid-19 dan program vaksinasinya.

Hingga riset ini dilakukan (Desember 2020), responden merasa tidak cukup mendapat penjelasan dalam penentuan jenis vaksin, kehalalan vaksin, keamanan, mutu, efikasi, dan efektivitasnya. Terbatasnya informasi yang sampai ke publik ini telah dipandang sebagai tidak transparannya Pemerintah dalam rencana besar vaksinasi Covid-19 ini.

Merujuk poin 2 dan 4, Pemerintah kiranya menyampaikan secara transparan kepada publik terkait aspek keamanan (komposisi kandungan vaksin) dan kehalalan (diterima sesuai dengan keyakinan agama) sehingga masyarakat (umat beragama) tidak lagi ragu untuk melakukan vaksinasi. Dalam hal ini BPOM dan MUI dapat menyampaiannya secara terbuka dan masif ke publik. []